

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

1. Alternatif model koperasi dianggap lebih cocok untuk diterapkan di Palabuhanratu oleh responden yang berpengalaman dengan pemberdayaan wilayah pesisir. Akan tetapi, masyarakat pesisir di Palabuhanratu, justru memiliki penialain yang negatif terhadap model koperasi. Penilaian negatif tersebut dilatarbelakangi oleh pengalaman masyarakat yang merasa dicurangi oleh pengurus koperasi. Meski demikian, tetap ada kemungkinan masyarakat akan menerima koperasi bila ada perbaikan di tataran pelaksanaan lapangan.
2. Model Perusahaan Induk bisa menjadi alternatif kedua. Kelebihan dari model ini yang dapat diterima warga adalah transaksi langsung antara perusahaan dengan nelayan dan pembagian deviden berdasarkan kepemilikan saham. Meski demikian, model ini berpotensi menghadapi resistensi dari para pemilik modal yang selama ini memberikan pinjaman sekaligus membeli hasil tangkap nelayan. Karena itu, peran pemerintah sangat dibutuhkan sebagai salah satu inisiator proses rekayasa sosial melalui model ini.
3. Lemahnya kinerja perangkat desa, serta belum adanya organisasi kemasyarakatan yang secara khusus menjalankan program pemberdayaan, membuat model pusat komunitas menjadi tidak relevan untuk diterapkan di Kecamatan Palabuhanratu. Kondisi ini juga memiliki potensi melemahkan kinerja koperasi perikanan, apabila pelaksanaan koperasi perikanan tidak dilakukan melalui kemitraan antara pemerintah lokal dan warga. Walaupun saat penelitian dilaksanakan kinerja perangkat desa masih memprihatinkan, tetap ada peluang untuk memperbaikinya. Pelibatan pihak ketiga dari masyarakat sipil, seperti konsultan atau pekerja sosial, bisa menjadi penggerak perbaikan tersebut.
4. Program pemberdayaan yang selama ini telah berjalan di Kecamatan Palabuhanratu masih jauh dari substansi pemberdayaan itu sendiri. Proses

pemberdayaan yang lebih fokus pada keikutsertaan warga pada program-program bantuan yang disalurkan telah mengaburkan makna partisipasi komunitas. Keikutsertaan mereka bukan didasari pada kesadaran dan ditujukan untuk melibatkan mereka dalam penyusunan rencana serta pengambilan keputusan, tetapi mobilisasi warga untuk mencapai target-target pelaksanaan program. Sebagai akibat dari bias konseptual antara partisipasi dan mobilisasi, keikutsertaan warga dalam program pemberdayaan yang selama ini telah berjalan tidak memberi dampak yang berarti pada peningkatan kesejahteraan komunitas.

5. Metode yang digunakan dalam penelitian ini hanya mampu mengungkap gejala-gejala dipermukaan saja. Mengenai informasi-informasi yang lebih mendalam, seperti bagaimana proses kerja patron-klien antara nelayan dan pemilik modal bekerja, lalu seperti apa sebenarnya kinerja perangkat desa, serta berbagai faktor-faktor lain yang mempengaruhi kesejahteraan komunitas pesisir tidak bisa diungkapkan. Keterbatasan metode kuantitatif yang memang hanya bisa menangkap pola dari gejala di lapangan membatasi penelitian ini. Oleh karena itu, bila salah satu model atau kedua model pemberdayaan yang direkomendasikan penelitian ini ingin diterapkan, masih membutuhkan penelitian lanjutan untuk menyesuaikan strategi umum dari model pemberdayaan dengan kenyataan-kenyataan di lapangan yang bersifat kualitatif.
6. Metodologi kualitatif dengan strategi penelitian partisipatori, studi kasus, atau etnografi sangat direkomendasikan untuk melanjutkan temuan lapangan dari penelitian ini.